

DAFTAR PUSTAKA

- Anggota IKAPI No. 081/DKI 96. *Seri Himpunan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia di Bidang Pertanahan*. Jakarta: CV. Novindo Pustaka Mandiri, 2009.
- Hidayah, Nurul, Hj. Yulies Tiena Masriani, and Suroto. "PEMUNGUTAN PAJAK BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) TERHADAP TRANSAKSI JUAL BELI TANAH DAN/ATAU BANGUNAN." n.d.
- IBLAM (School off law). *IBLAM (School off law)*. Desember 2023. <https://iblam.ac.id/2023/12/15/pengertian-ppat-dan-apa-perbedaannya-dengan-notaris/#:~:text=Secara%20umum%20baik%20PPAT%20ataupun,khusus%20menangani%20mengenai%20akta%20tanah>.
- Iswara, Septia Jati, and Fitika Andraini. "SISTEM VERIFIKASI BPHTB SECARA ONLINE TERHADAP TRANSAKSI JUAL BELI TANAH DAN/ATAU BANGUNAN APABILA TERDAPAT KURANG BAYAR PAJAK." *Jurnal Cahaya Mandalika*, n.d.: 663-677.
- Mustofa, S.H., M.Kn. *Tuntunan Pembuatan Akta-Akta PPAT*. Yogyakarta: Penerbit KaryaMedia, 2010.
- Resmi, Siti. *Perpajakan: Teori dan Kasus (Edisi 11 Buku 1)*. Jakarta: Salemba Empat, 2019.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. *Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022. *Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*.